

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANGGUN CHRISTINA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **842764**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.650.000.000

1. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HADIAH Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 775 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1970 m2/36 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/30 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/108 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 82.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HADIAH Rp. 80.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN 125 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 10.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 12.402.945

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.764.902.945

III. HUTANG

Rp. 600.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.164.902.945

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.